

Globethics Repository



KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	Hermawan, Herry
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-23 01:57:01
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/217722

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Oleh:

HERRY HERMAWAN

ABSTRACT

Indonesia is known as being a corrupt country. The survey called Corruption Perception Index 2013 placed Indonesia at the 114th position among 177 countries.

Corruption practices in Indonesia are caused by excessive human love to the materials. These conditions are not only due to lack of public understanding of religion, but also because of the separation of religion in human life. Religion is often isolated in private space than public space. This means that religion is considered as personal things and is limited to private affairs. As a result of this thinking, the public piety is neglected, so a thousand of social deviations are rampant without some religious resolutions.

How to solve the problem is to teach religion. In learning about religion, people must begin their knowledge and understanding with awareness that teaching-learning process is important. For creating conducive teaching-learning climate, mass media must be involved. Through mass media, people can be conditioned and taught.

I

PENDAHULUAN

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. *Corrumpere* atau *corruptus* dapat diartikan sebagai penyimpangan dari kesucian (*profanity*). Istilah "korupsi" merujuk kepada suatu perbuatan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.¹

Dalam kamus besar Indonesia kata *korupsi*, sebagai kata benda, berarti “penyelewengan” atau “penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”; *korupsi waktu*, berarti “penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi”. Kata *korupsi* dalam bentuk kata kerjanya, *mengorupsi*, berarti menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).²

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹ <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mapu5102/menukorupsi.htm> [23 April 2014; pk. 20.55]

² kbbi.web.id/korupsi

Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Tindakan korupsi merupakan perbuatan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujur, atau kecurangan yang dapat merugikan suatu bangsa.

Di Indonesia masalah korupsi telah menjadi fokus utama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Indeks korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Pada Maret 2010, berdasarkan hasil data survey dari “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) – Hongkong dan *Transparency Internasional* – Jerman menunjukkan, Indonesia termasuk negara terkorup nomor satu dari 16 negara yang ada di Asia Pasifik. Dari peringkat dunia, Indonesia termasuk negara 10 besar terkorup. Di tingkat Asia Tenggara kita termasuk negara terkorup nomor satu.³

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index (CPI)*⁴ Tahun 2012, yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia (TII)*, menunjukkan negara Indonesia masih belum lepas dari budaya korupsi yang sudah mendarah daging. Hal tersebut terlihat dari IPK Indonesia yang turun dari peringkat 110 menjadi 118 pada Tahun 2012. Peringkat IPK Indonesia juga masih kalah dengan Timor Leste. Tetapi pada Tahun 2013, menurut *Transparency International Indonesia*, Indeks Persepsi Korupsi menempatkan Indonesia pada posisi ke 114 dari 177 negara dengan skor 32.⁵

³ Sparta. *Praktek Korupsi Di Indonesia dari Sisi Filsafat Manusia*, melalui http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.kopertis3.or.id%2Fbitstream%2F123456789%2F1431%2F1%2FTulisan_Sparta_Korupsi%2520dan%2520FFilsafa%2520Manusia_Sparta.pdf&ei=MbpXU9rmE-PMsQT31YLBg&usq=AFOjCNE6OMIWj2RObqppOYtryAWi3i5oA&bvm=bv.65177938,d.cWc [16 April 2014; pk. 20.07]

⁴ Indeks Persepsi Korupsi didasarkan pada pendapat ahli tentang korupsi di sektor publik di masing-masing negara.

⁵ Antaranews.com, *RI improves ranking on global corruption perception index*, melalui <http://www.antaranews.com/en/news/91680/ri-improves-ranking-on-global-corruption-perception-index> [27 April 2014; pk. 07.41]; *countryeconomy.com*, *Corruption Perception Index* melalui <http://countryeconomy.com/government/corruption-perceptions-index?anio=2012> [27 April 2014; pk. 08.41]

Walaupun ada peningkatan tetapi secara regional Indonesia tidak mengalami banyak perubahan. Indonesia masih berada di jajaran bawah apabila dibandingkan dengan skor *CPI* (IPK) negara-negara di Asia Tenggara. Skor 32 ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum keluar dari situasi korupsi yang mengakar. Peringkat Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Secara regional, Indonesia masih kalah dengan Singapura (skor IPK 87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34), dan Timor Leste (33).

Jika dilihat secara global, lima negara dengan skor tertinggi adalah Denmark (90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87). Sementara lima negara dengan skor terbawah yakni Somalia (8), Korea Utara (8), Afghanistan (8), Sudan (13), dan Myanmar (15).⁶

Dari kasus-kasus korupsi yang terungkap selama ini, tentu saja kita dapat memperkirakan kemungkinan indeks korupsi Indonesia akan meningkat lagi. Tampaknya tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut.

Praktek korupsi di masyarakat telah merambah ke segala sendi kehidupan, seolah-olah korupsi menjadi sumber utama berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita terkadang sulit membedakan apakah ini praktek korupsi atau tidak. Hal ini disebabkan adanya suatu kondisi yang menganggap suatu praktek korupsi yang sudah biasa dan tidak dianggap sebagai korupsi lagi.

Praktek korupsi merupakan perilaku negatif yang mengorbankan manusia, makhluk lain dan lingkungannya. Korupsi merupakan tantangan pembangunan yang mengakibatkan tingginya

⁶ Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Hanya 'Puncak Gunung Es'* melalui <http://jdih.bpk.go.id/?p=44759> [16 April 2014, pk. 20.24]

biaya ekonomi dan sosial di Indonesia. Campur tangan dalam hukum dan kebijakan publik demi keuntungan pribadi atau swasta telah melemahkan daya saing Indonesia.

Kerusakan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan akibat praktek korupsi di bidang kehutanan. Dengan imbalan tertentu, izin hak pengusahaan hutan (HPH) diberikan kepada para pengusaha. Untuk memanfaatkan hutan tersebut, para pemegang HPH ini melakukan penebangan dan/atau pembakaran lahan hutan. Akibatnya hutan Indonesia menjadi rusak. Bahkan dalam skala negara Indonesia tercatat sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tertinggi. Setiap tahunnya, Indonesia kehilangan 3,8 juta hektare hutan. Di Jawa Barat saja, misalnya, 90% hutannya dari total luas 791.519,33 hektare, rusak parah. Secara fisik, hanya berupa tanah kosong yang tidak lagi berfungsi sebagai hutan.⁷

Penebangan hutan, baik yang dimaksudkan sebagai eksploitasi sumber daya hutan maupun sebagai pengembangan kawasan pemukiman di pedesaan, sering menimbulkan degradasi tanah dan berkurangnya areal hutan yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan keragaman hayati. Selain itu, kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyumbang terbesar hilangnya hutan. Hingga kini kebakaran hutan masih sering terjadi. Eksploitasi terhadap hutan ini telah menyebabkan hilangnya setengah luas hutan hujan tropis di Indonesia secara keseluruhan.⁸

Para perambah hutan umumnya lebih mementingkan keuntungan finansial daripada kelestarian hutan. Mereka tidak lagi menyadari pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dan tidak memedulikan kelestarian lingkungan serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akan

⁷ Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Occasional Paper No. 38 (i). Jakarta: Center for International Forestry Research.

⁸ Adimihardja, Kusnaka. 2004. *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.

mempercepat dan memperluas kerusakan hutan, serta menjadi penyumbang terbesar musnahnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan.

Para elit dominan (pemerintah dan pengusaha) umumnya bergerak dari faktor-faktor di luar hutan untuk membicarakan hutan. Hutan hanya berharga dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar hutan itu sendiri. Jelas dalam pendekatan ini hutan tidak dianggap utama, ia hanya merupakan *epiphenomenon* (gejala kedua).

Sampai saat ini pun tampaknya pemerintah dan pengusaha masih tetap melihat hutan sebagai barang dagangan. Dalam jaman yang masyarakatnya semakin cenderung kepada prinsip perputaran uang, maka hutan tidak lagi bersifat sakral, melainkan bersifat komersial. Ketika hutan menjadi barang dagangan maka sepenuhnya ia harus patuh kepada hukum dagang.

Contoh tersebut baru satu contoh praktek korupsi dalam sektor kehutanan saja, belum lagi korupsi yang terjadi dalam sektor-sektor lainnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat praktek korupsi bisa berjumlah ratusan triliun bahkan kalau diakumulasikan dapat mencapai ribuan triliun. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini bisa menyamai jumlah hutang negara Indonesia saat ini. Banyak pihak yang menulis dan menyatakan, apabila semua harta koruptor tersebut disita buat negara, maka seluruh hutang pemerintah RI yang sekitar Rp1.600 triliun akan lunas.

Ternyata perilaku manusia yang terkait dengan korupsi dapat berdampak negatif kepada manusia, dan makhluk lainnya. Korupsi telah menyengsarakan semua sendi kehidupan manusia.

II DEAGAMASASI

Kenapa manusia melakukan tindakan korupsi? Apa yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut?

Perbuatan korupsi disebabkan oleh kecintaan manusia yang berlebihan terhadap dunia dan materi. Manusia sudah jauh dari alam pikiran kesadaran yang hakiki sebagai manusia hamba Allah yang harus bertindak positif. Apalagi saat ini uang telah menjelma menjadi raksasa baru yang dapat mengatur segala sesuatu. Bahkan dalam sistem kehidupan yang modern ini, dengan sistem ekonomi yang kapitalistik, uang bertumbuh, berkembang dan berlipatganda melebihi kecepatan pertumbuhan penduduk. Jadi tidak mengherankan apabila hasrat untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya justru semakin bertambah. Ironinya, sikap seperti ini ditunjang oleh mentalitas masyarakat kita yang suka menerabas atau mengambil jalan pintas.⁹

Akibatnya pandangan terhadap Tuhan terhalang oleh materialisme yang merajalela dalam kehidupan manusia, bahkan berhala-berhala dunia telah membuat manusia terasing dari dirinya yang sejati, dan terjadilah proses dehumanisasi dan desakralisasi. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini telah menghalanginya untuk memperoleh kebahagiaan dan penglihatan spiritual. Karena dunia dan materi menjadi satu-satunya pusat perhatian manusia, maka seluruh kegiatannya diarahkan untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang menyenangkan dan senikmat mungkin baginya. Citra surga di atas bumi ini merupakan konsekuensi logis dari makin terlibatnya manusia dengan dunia.

Kondisi seperti ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap agamanya, tetapi juga karena adanya keterpisahan agama dalam kehidupan manusia. Agama hanya hidup dan dihidupkan dalam ruang pribadi, sementara dalam ruang publik,

⁹ Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

masyarakat harus patuh kepada hukum yang ditetapkan oleh negara, bukan hukum agama. Akibatnya terbentuklah masyarakat yang memiliki kepribadian ganda. Langkah yang satu ditujukan kepada Tuhan, sedangkan langkah yang lain ditujukan kepada sesuatu yang menjauhi Tuhan. Akhirnya orang-orang merasa asing terhadap agamanya sendiri.

Karena kehidupan agama dibatasi pada ruang pribadi, serta dibatasi hanya pada tempat dan saat tertentu, maka konsekuensinya masyarakat lebih memusatkan kepada keshalehan pribadi dan mengabaikan keshalehan publik, bahkan saat ini keshalehan pribadi telah menjadi salah satu model berpikir dan menjadi sebuah realitas sosial yang besar. Berbagai aktivitas keagamaan lebih banyak diarahkan kepada pembangunan pribadi yang shaleh. Asumsinya, jika para individunya shaleh, maka dengan sendirinya masyarakat pun akan menjadi shaleh.¹⁰

Masyarakat yang cenderung memisahkan agama dari ruang publik akan berpikir dan bertindak berdasarkan fungsinya tanpa mengaitkan apakah tindakannya selaras dengan agama atau tidak. Sebagai contoh, seorang kreator iklan akan membuat tayangan iklannya semenarik mungkin sesuai dengan keinginan produsen tanpa perlu mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan agama.

Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka keshalehan publik terabaikan, sehingga berbagai tindak korupsi dan penyimpangan sosial lainnya seolah dibiarkan merajalela tanpa kontribusi penyelesaian yang jelas dari sisi keagamaan. Masyarakat menjadi pasif terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial. Terbaikannya keshalehan publik mencerminkan ketidakkritisman masyarakat atau ketiadaan kontrol publik terhadap korupsi dan berbagai penyimpangan sosial.

¹⁰ Konsep keshalehan pribadi ini mirip dengan gagasan Weber tentang kenyataan sosial. Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Sedangkan keshalehan publik lebih mirip dengan realisme sosialnya Durkheim yang melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang membawahkan individu. Sebetulnya permasalahan antara Weber dengan Durkheim atau antara keshalehan pribadi dengan keshalehan sosial berkisar kepada skala prioritas, mana di antara keduanya yang lebih penting dan harus didahulukan.

Ketiadaan sikap kritis atau kontrol publik dari kalangan bawah ini menyiratkan adanya sikap pasif dalam diri masyarakat. Sebab itu, bukan hal yang aneh jika masyarakat lebih sering bersikap menerima apa saja yang menerpa dirinya, meskipun terpaan itu menyakitkan dirinya. Dalam alam pemikiran seperti ini, seseorang tidak perlu melakukan kritik sosial jika ia melihat berbagai penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi cukup dengan menasehati dirinya untuk tidak terjerumus mengikuti kehidupan seperti itu.

Kepasifan yang merupakan salah satu ciri masyarakat sebenarnya bukan hal yang negatif selama ia diartikan sebagai bagian integral dari keaktifan. Kepasifan dan keaktifan, renungan dan tindakan, tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Memisahkan kepasifan dari keaktifan sama saja dengan melakukan disfungsi terhadap peranan manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi. Pribadi Nabi Muhammad yang mengasingkan diri di Gua Hira, misalnya, tidak bisa dipisahkan dari pribadi Nabi Muhammad yang berperang di lembah Badar atau yang berhijrah dan membangun masyarakat di Madinah.

Jadi kepasifan dalam konteks keaktifan sesungguhnya berfungsi sebagai jeda yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merenungkan segala tindakannya. Misalnya dalam seminggu bekerja diberikan jeda dua hari libur, sabtu dan minggu. Dalam pekerjaan sehari-hari juga ada jeda selama kurang lebih satu jam untuk beristirahat. Dalam Islam shalat lima waktu menjadi jeda harian, shalat Jumat sebagai jeda mingguan, puasa Ramadhan merupakan jeda tahunan dan sebagainya. Tentu saja seseorang dapat menambahkan jeda ini sesuai dengan kebutuhannya.

Model berfikir yang meniadakan kekritisian ini memiliki implikasi bagi berbagai lapisan, baik atas, menengah maupun bawah. Mereka menjadi sosok yang kebal terhadap kritikan dan menyeretnya ke dalam mental tidak memiliki rasa bersalah apabila melakukan kesalahan publik,

dan hanya merasa bersalah jika kesalahannya telah diketahui masyarakat. Berbagai penyimpangan uang rakyat pun terkesan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat.

Para elit penguasa tidak malu-malu menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Kelas menengah juga disibukkan oleh kerajaan bisnisnya. Mereka seolah tidak peduli terhadap penyimpangan yang melanda masyarakat. Bagi kelompok ini yang penting mereka tetap untung. Masih banyak lagi contoh yang dapat diangkat kepermukaan berkenaan dengan ketidakpekaan pemerintah dan kelas menengah terhadap korupsi saat ini.

Terbaikannya keshalehan publik tidak semata-mata karena terkonsentrasinya kepada keshalehan pribadi saja, tetapi juga karena untuk menciptakan keshalehan publik diperlukan berbagai perangkat, seperti kekuatan hukum dan undang-undang yang dilandaskan pada agama. Selain itu perlu adanya mekanisme kontrol dan aparat penegak hukum yang menjamin terlaksananya hukum dan undang-undang tersebut. Tentu saja pengadaan perangkat lunak dan keras ini tidak mungkin dilakukan di Indonesia, setidaknya hingga saat ini, karena walaupun Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang beragama, namun pada dasarnya pemerintah atau negara tidak didasarkan pada asas keagamaan tertentu.

Terpenjaranya agama dalam ruang pribadi, mengakibatkan aspek ibadah berkisar pada aspek ritual atau tata cara pelaksanaannya saja, tidak dapat menghujam ke dalam jiwa dan tidak dapat menembus ke luar ruang pribadi. Akhirnya model beragama seperti ini tidak pernah dapat menimbulkan riak-riak perubahan sosial karena memang tidak mampu menghidupkan lingkungannya. Pada gilirannya masyarakat terperosok ke dalam pola hidup yang menekankan fungsionalisasi dan deagamisasi. Misalnya, seorang hakim akan berperan sesuai dengan tuntutan dan keahliannya tanpa harus melibatkan agama dalam setiap keputusannya, bahkan

tidak sedikit hakim yang terlibat korupsi. Padahal, jika ia seorang muslim, bisa jadi hakim ini bershalat, berzakat, berpuasa dan berhaji.

Contoh lain, seseorang melaksanakan shalat, akan tetapi ia tidak mampu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, padahal meninggalkan perbuatan ini merupakan konsekuensi yang dituntut kepada setiap orang yang mengerjakan shalat. Belum lagi, jika dalam ingatannya (ketika shalat) bercampur aduk dengan berbagai kepentingan dunia yang merasuk menggodanya, ingat untung-rugi dagangannya, terburu-buru oleh kesibukannya, dan lain-lain. Shalat seperti itu tidak lebih sekedar dari gerakan-gerakan anggota tubuh tanpa disertai dengan kekhusyu'an dan rasa hormat, bahkan tanpa menyoalkan bacaan ayat di dalamnya atau dzikir yang menyertainya. Shalat yang dilakukannya sama sekali tidak meninggalkan bekas bagi pelakunya dan tidak mengubah salah satu tingkah lakunya.

Contoh lainnya, seseorang berpuasa tetapi puasanya tidak mengantarkannya sampai ke tingkat taqwa padahal ketaqwaan merupakan tuntutan bagi yang berpuasa. Seseorang menunaikan zakat harta benda, padahal hartanya diperolehnya dengan cara yang haram atau bercampur dengan yang haram. Begitu juga seseorang menunaikan haji, tetapi ibadah hajinya tidak menambah dirinya bertaqwa dan tidak bertambah takut kepada Allah. Kehajiannya tidak dapat mencegah dari perkara kotor dan perbuatan keji ataupun zhalim.

Anehnya masyarakat umumnya, kaum muslimin khususnya, tidak merasakan kejanggalan ini, padahal mereka tengah menghadapi berbagai kesulitan yang menghantui jiwa dan perasaan sebagai akibat pengaruh kemajuan materi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka. Masyarakat telah mengalami kesulitan jiwa yang kronik, seperti kegoncangan jiwa dan pikiran, gila, bunuh diri, kecanduan minum-minuman keras, heroin,

mabuk-mabukan, kriminal maupun keganjilan-keganjilan lain yang termasuk kebobrokan ahlaq dan moral.

Masyarakat telah terhempas jauh dari puncak keluhurannya ke dalam jurang kenistaan sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini. Rasanya wajar-wajar saja jika bangsa ini tersingkir dari percaturan kepemimpinan umat manusia bagaikan buih. Mereka diperebutkan oleh berbagai macam kepentingan, dan diseret ke sana ke mari dari segala penjuru bagaikan seekor mangsa diperebutkan oleh kawanan serigala lapar.

Sulit untuk dipungkiri jika saat ini Bangsa Indonesia telah kehilangan jati dirinya. Masyarakat telah jauh melenceng dari tuntutan dan tuntunan agama. Agama tidak lagi menjadi dasar pemikiran dan perilaku umatnya, tidak lagi menjadi landasan hidup umatnya. Masyarakat sekarang ini tidak menyuruh orang lain berbuat makruf dan melarangnya berbuat munkar. Sebaliknya mereka justru melihat yang munkar sebagai sesuatu yang makruf dan melihat yang makruf sebagai sesuatu yang munkar.

Dalam situasi begini kehidupan masyarakat tak ubahnya rimba belantara, siapa kuat dia menang, yang satu menjadi serigala bagi yang lainnya. Egoisme, kemunafikan dan intimidasi berpadu dengan korupsi yang semuanya menjadi ciri masyarakat Indonesia yang, katanya, berbudaya dan beragama. Singkat kata masyarakat hidup dalam kehidupan yang penuh dengan cakar, kuku dan persaingan. Akibatnya masyarakat tidak lagi kritis terhadap berbagai praktek korupsi dan penyimpangan sosial lainnya, bahkan terkesan membiarkan penyimpangan itu terjadi.

Ringkasnya, pemisahan agama dari kehidupan nyata, pemisahan perasaan dari perilaku dan pemisahan aqidah dari syariat, mengakibatkan garis hidup masyarakat terbagi menjadi dua langkah. Langkah kesatu ditekankan kepada agama, dan langkah kedua ditekankan kepada

kehidupan nyata yang menjauhi agama. Dalam keadaan seperti ini kehidupan nyata terlepas jauh dari pancaran sinar aqidah. Hal ini membawa akibat lanjutan berupa tunduknya kehidupan kepada hawa nafsu dan selera syahwat.

Dalam keadaan seperti ini, keshalehan sosial akan sulit diwujudkan, padahal keshalehan sosial merupakan nilai yang dapat menjadikan hidup sebagai wadah untuk bekerjasama, bukan medan perselisihan yang destruktif. Dengan begitu, orang-orang yang lemah dan tidak mampu akan terjamin hingga mereka merasa hidup dalam kesatuan hati, pribadi dan rasa. Bukan kehidupan yang penuh dengan cakar, kuku dan persaingan seperti yang sering terjadi di masyarakat saat ini.

III GERAKAN PEMIKIRAN

Memang harus diakui jika praktek korupsi dan faktor-faktor yang melandasinya menjadi dilema kejiwaan yang kompleks, yang dapat kita lihat bukti kebenarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah parah seperti ini tentu saja bukan perkara mudah. Pekerjaan tambal sulam untuk meluruskan yang sudah bengkok jauh lebih sulit daripada mengerjakannya sejak pertama. Seringkali hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan sebagian besar sulit diperbaiki. Tetapi bagaimana pun upaya pelurusan ini perlu diusahakan terus menerus, karena jika dibiarkan akan semakin bengkok.

Manusia tidak akan merasakan pentingnya kestabilan ini sampai ia membongkar tumpukan kesesatan ini dari segala macam dongeng dan khayal. Dengan meneliti tumpukan kesesatan tersebut akan jelaslah betapa jauhnya penyimpangan yang terjadi akibat pencampuradukan antara yang haq dan bathil.

Jiwa manusia tidak akan stabil sebelum aqidahnya dimantapkan. Aqidah memiliki peranan besar dalam membebaskan jiwa manusia dari segala bentuk beban akibat perbenturan antara tuhan-tuhan, khayal-khayal dan dongeng-dongeng. Jika memang masyarakat ingin hidup berlandaskan agama, maka ia harus membenahi aqidahnya, sehingga dapat menjadi teladan yang tidak hanya dapat menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakatnya, tetapi juga mampu menarik simpatik dan mendorong orang lain untuk mempelajari dan mempraktekkan ajaran agamanya. Dengan demikian akan tercipta riak-riak perubahan dalam diri masyarakat ke arah yang lebih baik.

Oleh sebab itu untuk meluruskan aqidah ini, maka langkah pertama dan utama yaitu dengan meluruskan pemikirannya. Pemikiran akan lurus apabila manusia dididik dengan baik dan benar.

Berkenaan dengan pendidikan ini, Shihab mengusulkan agar aqidah dan syari'ah diajarkan di sekolah umum, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.¹¹ Tentu saja setiap konsep normatif dalam agama perlu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep teoritik dan dijabarkan ke dalam konteks sosial tertentu. Materi-materi ajaran yang disajikan harus dipertimbangkan secara matang, sehingga para anak didik dapat memahami dan menghayati sebab dan manfaat yang diperoleh dari materi yang dipelajarinya. Anak didik juga harus diberi latihan agar mereka kelak dapat memiliki kepekaan sosial dan kemampuan hidup mandiri. Hal ini dikemukakan mengingat penyajian agama saat ini masih terbatas pada penyajian materi pelajaran, sedangkan makna atau semangat yang terkandung di dalam pelajaran agama masih diabaikan. Oleh sebab itu permasalahan pendidikan agama erat kaitannya dengan realitas sosial yang ada.

Pada dasarnya manusia dituntut untuk terus menerus belajar, karena belajar merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Belajar juga tidak hanya terbatas pada aktivitas membaca, tetapi juga pada aktivitas menelaah, meneliti dan menghimpun. Tentu saja semua aktivitas belajar ini harus dapat membawa orang yang belajar kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama.

Selain belajar, mengajar juga sama pentingnya. Dengan demikian belajar dan mengajar merupakan dua aktivitas yang dapat dibedakan tetapi tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan. Aktivitas belajar-mengajar merupakan aktivitas yang berkesinambungan, yang harus selalu diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Melalui aktivitas belajar-mengajar akan tercipta saling ketergantungan yang progresif di antara manusia.

¹¹ Shihab, M. Quraish. 1992. *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung. Mizan.

Dengan demikian pada dasarnya, pembangunan dalam bidang agama berarti membangun cara berpikir yang terbuka, yang bersedia berdialog dengan pikiran-pikiran yang lain, meskipun bertentangan dengan keyakinannya. Tanpa keterbukaan dalam berpikir, maka akan sulit untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, yang dari hari ke hari semakin pesat dan kompleks. Tanpa keterbukaan dalam berpikir, maka agama hanya akan tinggal namanya, dan kitab suci hanya akan dibaca atau dilagukan tanpa dipahami maknanya. Jika kita tidak mengerti hakekat kandungan agama, maka bagaimana mungkin kita dapat mengamalkan amal sholeh?

Kendati begitu, proses belajar-mengajar ini tidak akan efektif, bahkan sia-sia, apabila iklim belajar-mengajar dalam kehidupan masyarakat tidak diciptakan, seperti diakui sendiri oleh Shihab, yang mengatakan, mewujudkan iklim ilmu pengetahuan, jauh lebih penting daripada menemukan teori ilmiah, karena tanpa wujudnya iklim ilmu pengetahuan, para ahli yang menemukan teori itu akan mengalami nasib seperti Galileo, yang menjadi korban hasil temuannya.¹²

Iklim belajar-mengajar hanya akan terbentuk apabila masyarakat menyadari arti penting belajar-mengajar dan apabila masyarakat terkondisikan oleh suasana belajar-mengajar yang kondusif. Kaitannya dengan upaya penyadaran dan pengondisian ini, media massa merupakan alat sekaligus sarana yang paling efektif untuk menyadarkan tentang pentingnya belajar-mengajar, dan mengondisikan mereka ke dalam suasana belajar-mengajar.

Melalui media massa, masyarakat dapat dididik akal dan jiwanya tanpa pembedaan dan pemisahan, serta disajikan secara serentak dan berkesinambungan. Dengan demikian masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam setiap proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Melalui media massa, masyarakat juga dididik untuk mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap setiap hasil perubahan tersebut. Oleh sebab itu, media massa dituntut untuk membuat

¹² Shihab, M. Quraish, *ibid.*

dan menayangkan program-program yang melibatkan akal pikiran, tutur kata yang menyentuh jiwa, kisah kebaikan dan keburukan manusia, serta keteladanan yang baik dari para pendidik.

Program-program yang mendidik seperti itu hanya dapat terwujud jika ada perangkat pendukungnya seperti seperangkat aturan yang jelas. Tanpa didukung oleh aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan media dan tentang belajar-mengajar, maka penanaman nilai-nilai yang fundamental yang mengarah kepada penciptaan iklim belajar-mengajar akan sulit terwujud.

Penciptaan iklim belajar-mengajar menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemilik dan praktisi media massa, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Diperlukan niat baik dari masyarakat dan media massa, serta kemauan politik dari pemerintah untuk mewujudkannya. Jika niat baik dan kemauan politik ini telah ada, langkah selanjutnya adalah membuat satu tema, satu tekad, satu visi dan misi, yang kelak membingkai sikap dan perilaku mereka dalam mewujudkan iklim belajar-mengajar. Sebagai contoh, ketika masa perjuangan kemerdekaan, semua pihak baik masyarakat, pemerintah, media massa, seniman, guru, politisi, dan yang lainnya, bergerak dalam satu tema yaitu merdeka. Semua pemikiran dan karyanya ditujukan untuk memicu dan memacu semangat berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang pun seharusnya semua bergerak dalam satu tema yang mengarah kepada pembentukan iklim belajar-mengajar, lebih jauh lagi yang mengarah kepada terciptanya keshalehan sosial.

Ada pepatah yang mengatakan, apabila kita menanam rumput maka tak satu pun padi yang akan bertumbuh, tetapi apabila kita menanam padi maka selalu ada rumput yang ikut bertumbuh. Maksudnya, apabila kita menanam keburukan, maka tak sedikit pun akan menghasilkan kebaikan, tetapi apabila kita menanam kebaikan, maka selalu saja ada keburukan yang ikut bertumbuh. Begitu juga dalam masyarakat yang telah rusak ahlaqnya, mengharapkan

adanya iklim belajar-mengajar yang kondusif merupakan sesuatu yang mustahil, sama mustahilnya dengan mengharapkan api bersifat dingin yang memang takdirnya bersifat panas, kecuali ada mujizat dari Allah.

Walaupun demikian, kita tidak boleh berputus asa menunggu datangnya ‘mujizat’ dari Allah. Kita tidak boleh berdiam diri menunggu datangnya Ratu Adil. Sebaliknya, kita senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menghilangkan peranan setan dalam diri kita dan dalam diri masyarakat. Kita harus berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, untuk menciptakan Ratu Adil, sampai datang pertolongan dari Allah SWT.